

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang mencakup interaksi kelompok variabel seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Secara umum, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu wilayah dan pemerataan pendapatan bagi penduduk wilayah tersebut. Penting bagi sebuah daerah untuk mengejar pembangunan ekonomi yang stabil dan sehat.

Kesehatan pembangunan ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat melalui berbagai instrumen, salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencangkup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang disediakan agar membuat pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja sehingga tidak terjadinya beban pengangguran.

Pengangguran muncul dari masalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Kaum klasik seperti *Adam Smith*, *David Ricardo* dan *Thomas Robert Malthus* berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka muncul kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Jika penduduk mampu memperoleh pekerjaan, maka peningkatan kesejahteraan bangsa dapat terjadi. Tetapi, jika penduduk tidak memperoleh pekerjaan, maka muncul pengangguran dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Irawan dan Suparmoko, 2002:88).

Salah satu daerah di Indonesia yang mendapat perhatian atas ketenagakerjaan adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan populasi terpadat ketiga di Indonesia (BPS Indonesia, 2021). Berikut adalah jumlah konkret penduduk Jawa Tengah selama lima tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2016	34.019.100
2017	34.257.900
2018	34.490.800
2019	34.718.200
2020	36.516.040

Sumber: BPS Indonesia, 2021

Jumlah penduduk yang terus bertambah sepanjang tahun menyebabkan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas penduduk dengan beragam usia. Mulai dari usia kanak-kanak, usia produktif, hingga jenjang lansia. Kombinasi usia penduduk yang menempati Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Usia

Tahun	Jumlah Penduduk Menurut Usia (Jiwa)		
	0-14 Tahun	15-64 Tahun	Di atas 65 Tahun
2014	8.371.597	22.592.924	2.558.142
2015	8.328.652	22.805.633	2.639.856
2016	8.282.399	23.007.579	2.729.117
2017	8.236.283	23.195.075	2.826.507
2018	8.194.304	23.363.185	2.933.346
2019	8.151.005	23.516.110	1.160.788
2020	8.190.778	25.506.691	2.818.566

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh penduduk usia produktif yang terus meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Pertambahan penduduk usia produktif yang paling besar terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 1.990.581 jiwa. Hal tersebut sesuai dengan prediksi pemerintah yang mengindahkan bonus demografi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Peningkatan penduduk produktif di Provinsi Jawa Tengah menjadi peluang bagi pemerintah untuk menarik investasi, pembukaan kawasan industri, dan ekspor tenaga kerja.

Dampak dari peningkatan penduduk produktif (bonus demografi) Jawa Tengah juga sudah diantisipasi oleh pemerintah. Pemerintah sudah meresmikan pembangunan Kawasan Industri (KI) Terpadu Batang di Kabupaten Batang pada 30 Juni tahun 2020. Dalam KI Terpadu Batang sudah mulai diisi oleh nama-nama besar seperti PT. PP (Persero), PT. Wijaya Kusuma (Persero), PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero), dan Argo Manunggal Group. Pembukaan Kawasan Industri Terpadu dan bonus demografi menjadikan Jawa Tengah primadona investasi. Pernyataan Jawa Tengah sebagai primadona investasi bukan hanya kata semata. Investasi yang masuk dan tercatat oleh pemerintah dalam 4 tahun terakhir selalu menunjukkan nilai yang meningkat. Berikut adalah tabel data investasi masuk.

Tabel 1.3 Data Investasi Masuk di Jawa Tengah

Tahun	Nilai Investasi Masuk (Juta Rupiah)
2016	1.022.675,2
2017	1.030.795,9
2018	2.372.703,3
2019	2.723.240,2

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Dalam kurun waktu empat tahun, investasi masuk ke Jawa Tengah terus bertambah. Rata-rata peningkatan investasi yang masuk sebesar 566.855 juta rupiah per-tahun. Dengan pertambahan nilai investasi masuk tersebut, angka

pengangguran di Jawa Tengah juga terus menurun selama 3 tahun dimulai dari tahun 2017. Semakin banyak penduduk usia produktif memiliki mata pencaharian dan semakin berkurangnya jumlah pengangguran. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah

Tahun	Tingkat Pengangguran (%)
2016	4,41
2017	4,57
2018	4,47
2019	4,44

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Namun, berdasarkan data dalam dua tabel di atas pengangguran masih belum teratasi secara sempurna. Karena angka pengangguran masih naik turun di beberapa tahun, padahal nilai investasi terus masuk. Bahkan dalam catatan BPS Jawa Tengah, angka pengangguran tercatat naik. Tahun 2012 angka pengangguran sebesar 5,61% naik menjadi 6,01%. Bahkan penurunan angka pengangguran setelah tahun 2016 tidak mencapai 1% setiap tahunnya. Terdapat sebuah masalah ketenagakerjaan dalam kasus tersebut. Seharusnya, dengan nilai investasi yang terus naik pemerintah mampu untuk mengekstensikannya menjadi pembukaan lapangan kerja baru.

Permasalahan tenaga kerja di Jawa Tengah menjadi semakin mengkhawatirkan dengan terjadi-nya *outbreak* virus *Corona* di tahun 2020. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi bidang

perekonomian. Terjadi pengurangan tenaga kerja besar-besaran, penutupan berbagai bisnis usaha, serta membekunya uang investasi yang masuk karena berbagai kegiatan ekonomi sangat dibatasi pada masa pandemi. Lonjakan besar dalam jumlah pengangguran tidak dapat dihindari. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pengangguran naik menjadi 6,48%. Sebuah solusi harus dikeluarkan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan yang mengkhawatirkan seperti ini. Ditambah lagi tahun 2020 adalah tahun dimulainya bonus demografi Indonesia, yang berarti Jawa Tengah juga akan mendapat bagian bonus demografi yang besar. Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Sasana, 2009). Masalah ketenagakerjaan Jawa Tengah harus segera diatasi agar kesejahteraan masyarakat tidak terganggu.

Upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan telah dimulai di berbagai variabel ekonomi. Akan tetapi, tidak semua variabel-variabel ekonomi dapat memberikan dampak signifikan pada usaha perbaikan ketenagakerjaan Jawa Tengah. Hanya ada beberapa variabel saja yang signifikan dan memberikan dampak positif terbaik. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menemukan variabel-variabel signifikan tersebut.

Variabel pertama yang dipilih adalah jumlah UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jumlah UMKM dihipotesiskan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena sebuah UMKM dalam setiap bidang ekonomi membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan aktivitasnya. Dalam logika, semakin banyak dan

semakin besar UMKM, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin banyak. Artinya semakin banyak angka pengangguran berkurang. Namun, seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja belum diketahui. UMKM merupakan unit usaha paling mudah berkembang dan dapat dimulai oleh tiap individu. Kedua indikasi tersebut menjadi dasar pemikiran bahwa semakin banyak jumlah UMKM dapat membantu penyerapan tenaga kerja. Terdapat beberapa penelitian yang telah menunjukkan pengaruh UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja. Terdapat penelitian dari Andre Widdyantoro (2013) yang menunjukkan bahwa jumlah UMKM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun penelitian Andre Widdyantoro menggunakan data jumlah UMKM di seluruh Indonesia. Berbeda dengan penelitian ini yang hanya mencakup Jawa Tengah. Penelitian dari Roswita Hafni dan Ahmad Rozali (2015) juga menunjukkan poin penting UMKM karena penelitian tersebut memberikan hasil bahwa UMKM berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan dua penelitian tersebut, variabel jumlah UMKM dipilih untuk diteliti. Dari hasil uji data dalam penelitian ini, akan ditentukan sebuah kebijakan terkait dengan UMKM.

Variabel yang kedua adalah PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). PDRB memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi. Setiap negara/wilayah yang ingin mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya pasti berusaha untuk meningkatkan nilai PDRB setiap tahun. PDRB yang tinggi mengimplikasikan bahwa sebuah daerah itu makmur, maka mampu menarik

banyak tenaga kerja baru untuk memperoleh pekerjaan. Karena tiap bidang dalam rincian PDRB mampu memberikan kontribusi yang besar, maka setiap bidang tersebut membutuhkan lebih tenaga kerja untuk memberikan *output* yang lebih dari *output* sebelumnya. Dalam penelitian yang ditulis oleh I Gusti Agung Indradewa (2015), PDRB memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali. Sedangkan, dalam penelitian Ibnu Fadjri (2013) yang berjudul Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2007-2011, dikemukakan hasil bahwa PDRB tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Kalimantan Barat. Dua hasil berbeda tersebut menimbulkan dugaan bahwa PDRB memberikan pengaruh yang berbeda terhadap penyerapan tenaga kerja pada masing-masing daerah di Indonesia. Maka dari itu, variabel PDRB dipilih sebagai variabel independen penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Variabel yang ketiga adalah tingkat upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dalam pasar tenaga kerja, UMP merupakan “harga” dari *output* yang dihasilkan tenaga kerja. Semakin tinggi UMP, maka semakin tinggi pula keinginan penduduk usia produktif untuk berkerja. Beberapa penelitian menunjukkan kenaikan upah berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja (Buchari, 2015; Gindling & Terrel, 2006) yang sejalan dengan teori upah. Sementara itu penelitian lain menunjukkan adanya hubungan positif antara

upah dan penyerapan tenaga kerja (Akmal, 2010; Sri Mulatsih dan Fridhowati, 2011; Indradewa dan Natha, 2015), di mana kenaikan upah dianggap sebagai insentif bagi tenaga kerja terampil. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pada faktor penentu penyerapan tenaga kerja, sedangkan penelitian ini fokus pada bagian pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja.

Provinsi Jawa Tengah harus menemukan solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang tengah terjadi saat ini. Provinsi Jawa Tengah perlu diangkat sebagai subjek penelitian berdasarkan dari argumen yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari berbagai variabel ekonomi yang ada, penelitian ini memilih tiga variabel yang dianggap paling efektif dalam menghadapi masalah tersebut, yakni jumlah UMKM, PDRB, dan tingkat UMP. Ketiga variabel tersebut dipilih atas dasar dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh PDRB Jateng terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh jumlah UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PDRB Jawa Tengah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tingkat UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang lebih jelas mengenai pengaruh jumlah UMKM, PDRB Jawa Tengah, dan tingkat UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu memberikan referensi dalam penelitian berikutnya dan dapat menambah informasi lebih serta pengalaman dalam dilakukannya penelitian ini.

3. Bagi Pemerintah Jawa Tengah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi untuk dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan yang muncul di masa depan.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian dari studi terkait, maka hipotesis dalam penelitian adalah:

1. Diduga jumlah UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga PDRB Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga tingkat UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, variabel penelitian, dan teknik serta model data yang diteliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisa data, hasil penelitian yang diuji, dan hasil interpretasi dari hasil yang telah diuji.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, dan saran

